



Judul : Kaster TNI Hidup Lagi, Relevankah pada Era Perang Modern?
Tanggal : Jumat, 13 Maret 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

Kaster TNI Hidup Lagi, Relevankah pada Era Perang Modern?

Pada 25 tahun lalu, jabatan Kepala Staf Teritorial atau Kaster TNI dipangkaskan sebagai bagian dari reformasi TNI dan Reformasi 1998. Kini, pada era perang yang semakin modern, jabatan itu justru dihidupkan lagi.

Hidayat Salam

Keputusan Panglima TNI Jenderal Agus Sulisanto untuk menghidupkan kembali jabatan Kepala Staf Teritorial jadi sorotan. Dua puluh lima tahun lalu, jabatan itu dipangkaskan sebagai bagian dari reformasi TNI yang menjadi tuntutan Reformasi 1998. Dihidupkannya kembali jabatan itu pun memunculkan kekhawatiran orientasi pertahanan kembali terlalu berfokus di darat dan mengabaikan tantangan perang modern.

Pengaktifan kembali jabatan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI terungkap dalam mutasi dan promosi perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) pada Maret 2026. Di antara sederet pati yang terdampak, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangko-gabwilhan) III Letnan Jenderal Bambang Trisnohadi ditunjuk Panglima TNI untuk menjabat sebagai Kaster TNI.

Tak sebatas itu, ada pula jabatan Wakil Kaster TNI yang diisi oleh Mayor Jenderal Suhardi yang sebelumnya menjabat Asisten Teritorial Panglima TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigadir Jenderal Aulia Dwi Nasrullah membenarkan adanya pengisian jabatan Kaster dan Wakil Kaster TNI.

Namun, Aulia tidak menjelaskan alasan untuk menghidupkan kembali posisi Kaster TNI itu. Ia hanya menyampaikan, mutasi jabatan di tubuh TNI merupakan hal yang biasa, dalam rangka pembinaan karier prajurit dan kebutuhan organisasi.

Dalam mutasi dan promosi kali ini, total ada 35 prajurit yang terdampak. Terdiri dari 27 pati dan 8 pamen.

Langkah ini dilakukan agar organisasi TNI tetap adaptif terhadap tantangan tugas yang dinamis. Setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI," katanya, Kamis (12/3/2026).

Catatan *Kompas*, jabatan Kaster TNI dihidupkan di era pemerintahan Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid, persisnya pada 2001. Posisi itu terakhir dijabat oleh Letnan Jenderal Agus Widjojo. Agus kemudian diangkat menjadi anggota DPR/MPR sekaligus menjabat Wakil Ketua MPR dan Ketua Fraksi TNI/Polri setelah tak lagi menjabat Kaster TNI (*Kompas*, 30/10/2001).

Penghapusan jabatan itu bagian dari agenda Reformasi TNI yang jadi tuntutan Reformasi 1998. Agenda dimaksud, mengurangi peran sosial politik militer yang selama Orde Baru diwujudkan melalui konsep Dwifungsi ABRI (sebelum berubah menjadi TNI pada 1999). Fungsi teritorial yang menjangkau hingga desa melalui struktur seperti kodam, kodim, dan koramil dianggap sebagai instrumen yang membuat militer terlalu terlibat dalam urusan sipil dan politik.

Sebelum jabatan Kaster TNI dihapuskan, Agus Widjojo saat masih menjabat Kaster TNI dan diwawancarai *Kompas* pada 20 Agustus 2001 sempat menyampaikan, fungsi teritorial pada hakikatnya adalah pembinaan atau manajemen potensi nasional di daerah untuk mendukung kepentingan pertahanan dan keamanan sehingga sebenarnya merupakan fungsi pemerintahan sipil di daerah.

Namun, fungsi itu menjadi bagian dari komando teritorial dan dilakukan oleh TNI sebagai kelanjutan dari tatanan yang berasal dari taburan perjuangan kemerdekaan dalam bentuk pemerintahan gerilya (*Kompas*, 22/8/2001).

Sebelum menghidupkan jabatan Kaster, TNI dengan didukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terlihat terus memperkuat sistem pertahanan komando teritorial.

Sebanyak enam komando daerah militer (kodam) baru dibangun sehingga saat ini total jumlahnya di seluruh Indonesia sebanyak 21 kodam.

Di luar itu, dibentuk pula Batalyon Teritorial Pembangunan oleh TNI AD. Batalyon ini bahkan direncanakan tersebar di seluruh Indonesia, 514 kabupaten/kota, untuk mendukung stabilitas dan pembangunan. Setiap batalyon akan terdiri atas minimal empat kompi, yakni kompi pertanian, peternakan, medis, dan zeni.

Kompi pertanian ditugasi untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada nasional. Kompi peternakan bertugas memperkuat penyediaan protein hewani. Kompi medis bertindak sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan penanganan bencana. Adapun kompi zeni akan difokuskan pada pembangunan sarana-prasarana, khususnya di daerah tertinggal dan rawan bencana.

Lantas, bagaimana Komisi I DPR sebagai pengawas TNI melihat dinamika reorganisasi terbaru di tubuh TNI melalui dihidupkannya kembali jabatan Kaster tersebut?

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Amelia Anggraeni, meyakini, dihidupkannya kembali jabatan Kaster TNI merupakan langkah untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan satuan teritorial di daerah.

Dalam konteks geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari ribuan pulau, keberadaan struktur yang mengintegrasikan kekuatan teritorial tetap dibutuhkan.

Dengan demikian, fungsi Kaster dapat menjadi penguat kebijakan di tingkat Mabes TNI dengan implementasi di satuan-satuan kewilayahan, terutama dalam penguatan batallion di daerah.

Amelia pun melihat pendekatan teritorial tetap relevan dalam pertahanan modern saat ini yang bersifat multidomain. Stabilitas wilayah, ketahanan masyarakat, dan kemampuan deteksi dini di daerah tetap menjadi fondasi penting dalam pertahanan nasional.

"Soal kritik bahwa ancaman modern kini banyak berasal dari siber, informasi, dan teknologi, saya menilai bahwa penguatan komando teritorial tidak berarti mengabaikan dimensi baru peperangan," katanya.

Meski demikian, ia mengingatkan, penguatan komando teritorial tetap harus diiringi modernisasi kapasitas, seperti integrasi sistem intelijen wilayah berbasis data, kemampuan menghadapi perang informasi, dan peningkatan literasi keamanan digital di masyarakat.

Prioritas modernisasi

Selain itu, kebijakan penguatan teritorial tidak boleh menggeser prioritas modernisasi kekuatan utama TNI, khususnya di dimensi udara dan laut.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia menghadapi tantangan strategis yang signifikan. Dalam pertahanan udara, Indonesia masih membutuhkan peningkatan pada kemampuan deteksi dan intercept udara menjadi sangat penting karena perkembangan teknologi rudal, *drone* militer, dan pesawat tanpa awak yang semakin kompleks.

Sementara itu, pertahanan laut, sebagai negara dengan

jalur pelayaran strategis dunia, Indonesia perlu memperkuat armada kapal perang, sistem pengawasan laut, dan kemampuan *anti-submarine warfare*.

"Jadi, saya tegaskan kembali bahwa langkah tersebut harus berjalan paralel dengan modernisasi teknologi pertahanan, terutama pada dimensi siber, udara, dan laut. Dengan demikian, sistem pertahanan Indonesia dapat berkembang secara seimbang antara kekuatan wilayah dan kemampuan militer modern," tutur Amelia.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal, pun berpandangan, meski tren peperangan global telah bergeser ke ranah siber dan perang modern, TNI tetap tidak boleh serta-merta meninggalkan pendekatan teritorial konvensional. Struktur komando teritorial TNI dapat berperan penting sebagai penghubung antara kekuatan militer dan masyarakat di wilayah.

Melalui jaringan kewilayahan yang tersebar hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, TNI memiliki kemampuan untuk memahami dinamika sosial secara langsung. Meski demikian, efektivitas kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh struktur organisasi, tetapi juga oleh kualitas koordinasi dan implementasi di lapangan.

"Nah, dihidupkannya Kaster TNI ini mungkin bukan hanya dalam konteks koordinasi, tetapi pentingnya *input* untuk memastikan semua yang dari bawah itu benar-benar valid dan tervalidasi. Jadi, dari teritori pembangunan dari Kodam, dari semua unit TNI itu bisa memberikan masukan yang *qualified*, *terverifikasi*," katanya.

Terkait dengan ancaman perang modern, Syamsu memastikan TNI sudah memiliki peta jalan (*roadmap*) yang jelas dalam pengadaannya hingga 2029. Semua kebijakan sudah dibuat untuk menghadapi situasi perang asimetris jika nanti terjadi.

"Jadi, kita pasti akan bersiap, satu-dua tahun ke depan siap. Dan, anggaran kita juga sudah trennya sudah dinaikkan. Makanya, kita mengembangkan beberapa yang salah satunya itu, ya, kapal selam otonom, kita juga sudah minta fregat dari Jepang. Tetapi, yang paling penting itu adalah sistem sibernya kita itu yang *update*," tutur Syamsu.